

KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR (SD NEGERI 001 KARANGAN)

Yohanes Tominsen¹, Usfandi Haryaka², Laili Komariyah³
yohanestominsen504@gmail.com¹, usfandi.haryaka@fkip.unmul.ac.id²,
laili.komariyah@fkip.unmul.ac.id³
Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Kebijakan kepala sekolah adalah suatu usaha yang diarahkan untuk mewujudkan keutuhan sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan kepala sekolah serta faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 001 Karang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola Miles & Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber data menggunakan tiga informan yakni guru kelas, kepala tata usaha, dan kepala unit perpustakaan. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 1) Perencanaan dilaksanakan sesuai dengan manajemen kebijakan sekolah secara rinci seperti diadakan rapat dengan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan guna mengidentifikasi tujuan, menentukan strategi, mengalokasikan sumber daya, dan mengatur jadwal pelaksanaan serta prosedur perencanaan dan skala prioritas yang dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan siswa, 2) Pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tanggung jawab kepada tenaga kependidikan yang ditunjuk sebagai koordinator kebijakan yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan-kebijakan serta memastikan pelaksanaannya sesuai rencana dan tepat sasaran, 3) Pelaksanaan kebijakan dari proses perencanaan sampai pengorganisasian dilakukan sesuai dengan fungsi-fungsi kebijakan kepala sekolah dan pelaksanaan kebijakan dalam peningkatan mutu Pendidikan sudah efektif dilakukan sehingga mutu Pendidikan disekolah ini menjadi lebih baik dan meningkat, dan 4) Pengawasan dilakukan dengan memantau pelaksanaan kebijakan dimulai dari memantau kerjasama dalam menerapkan strategi kebijakan kepala sekolah, memantau setiap kebijakan yang berjalan sesuai rencana dan tetap sasaran maupun sebaliknya, serta memastikan setiap kebijakan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kebijakan kepala sekolah merupakan usaha untuk mengupayakan sumber daya yang ada yang dibutuhkan pada proses pelaksanaan kebijakan demi lancarnya dan tercapainya peningkatan mutu pendidikan khususnya di Sekolah SD Negeri 001 Karang. Kebijakan kepala sekolah yang efektif dan terarah dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Implikasi dari kebijakan tersebut tidak hanya terlihat pada hasil akademik siswa, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan lingkungan belajar yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi kepala sekolah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan, Kepala Sekolah, Mutu Pendidikan.

ABSTRACT

Principal policy is an effort directed at realizing the wholeness of the school in improving the quality of school education. This study aims to describe the planning, organizing, implementing and monitoring of the principal's policy as well as the supporting and inhibiting factors in improving the quality of education at SD Negeri 001 Karang. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique in this study uses the Miles & Huberman pattern with the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing while the data validity technique uses data source triangulation and technical triangulation. Triangulation of data sources

used three informants namely class teachers, head of administration, and head of the library unit. The conclusions in this study are: 1) Planning is carried out in accordance with school policy management in detail such as meetings with all educators and education personnel to identify goals, determine strategies, allocate resources, and organize implementation schedules as well as planning procedures and priorities based on the level of student needs, 2) Organizing is done through the division of responsibilities to education personnel appointed as policy coordinators who are responsible for carrying out policies and ensuring their implementation according to plan and on target, 3) Implementation of policies from the planning process to organizing is carried out in accordance with the functions of the principal's policy and the implementation of policies in improving the quality of education has been effectively carried out so that the quality of education in this school is getting better and improving, and 4) Supervision is carried out by monitoring the implementation of policies starting from monitoring cooperation in implementing the principal's policy strategy, monitoring every policy that goes according to plan and remains on target or otherwise, and ensuring that each policy has been implemented according to a predetermined schedule. The principal's policy is an effort to seek the existing resources needed in the policy implementation process for the sake of smoothness and the achievement of improving the quality of education, especially at SD Negeri 001 Karanganyar School. Effective and well-directed principal policies can have a significant positive impact on improving the quality of education in primary schools. The implications of such policies are not only seen in students' academic outcomes but also in character development, social skills and a better learning environment. Therefore, it is important for principals to formulate and implement policies that are holistic and sustainable.

Keywords: Policy, Principal, Education Quality.

PENDAHULUAN

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan semakin diakui sebagai komponen esensial dalam manajemen pendidikan. Di tingkat global, kepemimpinan sekolah yang kuat telah menjadi pusat perhatian, di mana kebijakan kepala sekolah berfungsi sebagai faktor kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan, yang pada gilirannya berpengaruh signifikan terhadap pencapaian akademik siswa. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya terbatas pada pengawasan administratif, tetapi juga melibatkan perumusan dan penerapan kebijakan strategis yang secara langsung berdampak pada mutu pendidikan di sekolah (Amirudin & Abu Bakar, 2023). Kebijakan-kebijakan tersebut memainkan peran penting dalam menetapkan ekspektasi, menyediakan sumber daya yang memadai, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta mendorong pengembangan profesional berkelanjutan.

Kebijakan kepala sekolah di Indonesia, terutama dalam pendidikan dasar, telah menjadi fokus utama dalam diskursus pendidikan. Mengingat keberagaman kondisi pendidikan—yang bervariasi dalam hal sumber daya dan infrastruktur—kepemimpinan sekolah dihadapkan pada tantangan serta peluang yang berbeda. Kepala sekolah memainkan peran sentral dalam menciptakan kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya (Hanim & Wazir, 2022). Kebijakan yang diterapkan oleh kepala sekolah dapat menjadi faktor yang memperkuat atau justru menghambat mutu pendidikan, tergantung pada kualitas perancangan dan pelaksanaannya. Kebijakan yang mendukung pengembangan profesional, menyediakan sumber daya pengajaran yang memadai, serta membangun budaya sekolah yang positif memiliki kaitan langsung dengan tingkat motivasi dan efektivitas guru (Rapang et al., 2022). Penelitian empiris telah mengungkapkan adanya korelasi yang signifikan antara kebijakan kepala sekolah dan mutu pendidikan. Kepala sekolah yang merumuskan kebijakan yang jelas serta mendukung secara signifikan berkontribusi pada terciptanya iklim sekolah yang positif, yang merupakan faktor krusial dalam peningkatan mutu pendidikan (Dasmana et al., 2021).

Dalam dunia pendidikan di era globalisasi masalah yang sangat serius dalam bidang pendidikan dinegara kita adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Berbagai kalangan masyarakat, termasuk ahli pendidikan, bahwa masalah mutu pendidikan sebuah proses pendidikan sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat penyediaan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan bangsa dalam berbagai bidang. khususnya dalam mutu Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah masih rendah.

Oleh karena itu, sekolah di tuntut dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan terwujud kebijakan kepala sekolah dalam memimpin dan mengatur kegiatan di sekolah sehingga dapat meningkatkan kinerja guru, pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan penyediaan sumber daya manusia dan meningkatkan kinerja guru dengan mengatur kegiatan kegiatan di sekolah yang di buat oleh kepala sekolah.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan melihat berbagai faktor faktor yaitu. Menurut Fattah dalam buku Engkoswara dan Aan Komariah ada tiga faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu: (1) kecukupan sumber sumber pendidikan dalam arti mutu tenaga kependidikan, biaya, sarana belajar, (2) mutu proses belajar yang mendorong siswa belajar efektif, dan (3) mutu pengeluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap ,keterampilan dan nilai-nilai(Kholiq & Syamsudin, 2022).

Dengan demikian, mutu pendidikan di sekolah akan berkembang dan memiliki kontribusi yang besar terhadap kemajuan suatu bangsa sehingga tidak dapat diabaikan eksistensinya sebagai wadah untuk mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan dengan terpenuhnya tenaga kependidikan, biaya sarana belajar, sehingga mendorong siswa belajar efektif dalam bentuk pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai nilai.

Di samping itu juga, ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan di indonesia tidak mengalami peningkatan secara merata yaitu:

1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production fundation atau input input analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen, yaitu terlalu memusatkan pada input proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan.
2. Penyelenggraan pendidikan nasional yang sentralistik, telah mengakibatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang mempunyai jalur yang panjang dan kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan Pendidikan nasional
3. Peran serta masyarakat, khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan yang minimnya partisipasi mereka terhadap pendidikan.

Dalam kata lain masalah yang mendasar terkait dengan masalah mutu pendidikan di indonesia yaitu:

1. Proses pembelajaran di lembaga pendidikan yang selalu berorientas pada penguasaan teori dan hapalan pada mata pelajaran sehingga menyebabkan kemampuan belajar dan penalaran anak didik kurang berkembang.
2. Kurikulum di sekolah yang selalu berubah ubah yaitu kurikulum 1994 berupa CBSA, menjadi KBK, lalu ditahun 2006 menjadi KTSP dan K13 (Berbasis karakter), dan terkini Kurikulum Merdeka.
3. Pelaksanaan pembinaan profesi jabatan guru belum tersistem.
4. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu terpenting dalam pembangunan pendidikan UU No 2o tahun 2003 telah mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD kedinasan, namun kenyataanya hanya beberapa dari yang

menggratiskan pendidikan yang hanya untuk sekolah negeri, dan tidak sepenuhnya gratis yang masih ada beberapa pungutan beberapa biaya dari sekolah yang penagaturannya biasanya di lakukan oleh sekolah dan komite sekolah.

5. Otonomi daerah yang menuntut penyelenggaraan pendidikan nasional yang memenuhi kebutuhan pembangunan daerah sebagai dasar pembangunan nasional dan kerjasama regional.

Dengan masalah yang mendasar terkait dengan masalah mutu pendidikan diindonesia, maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan profesional karena kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kunci keberhasilan suatu sekolah pada hakekatnya terletak pada efisiensi dan efektivitas seorang kepala sekolah. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah dan keberhasilan kepala sekolah adalah keberhasilan sekolah.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berubah menuju kearah kemajuan, dalam era persaingan yang semakin bebas seperti saat ini. Pemimpin lembaga pendidikan dituntut untuk dapat memberikan kualitas pendidikan yang bermutu karena pendidikan yang kurang bermutu lama kelamaan akan ditinggal oleh masyarakat dan tersingkirkan dengan sendirinya.

Dalam konteks pendidikan, mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses yang inputnya yaitu struktur organisasi sekolah peraturan perundang undangan , visi misi tujuan dan sasaran yang ingin di capai. Oleh karena itu tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input.

Namun demikian, indikator mutu pendidikan menunjukkan peningkatan yang berarti bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan out put yang setinggi-tingginya. pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemakai lulusan).

Dengan begitu bahwa mutu pendidikan terkait dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dimana kebutuhan masyarakat dan perubahan yang terjadi bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pendidikan juga harus bisa menyeimbangi perubahan yang terjadi secara cepat, dan bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan memerlukan pemetaan dan kebijakan yang profesional yaitu oleh kepala sekolah. Hal itu diperlukan personal yang mampu dan tangguh. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian penyerasian serta pemanduan input sekolah (guru, siswa ,kurikulum sarana dan prasarana) sehingga pembelajaran yang menyenangkan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

Selain itu pada pengamatan dan analisis yang telah di lakukan menurut Hasbullah di ketahui bahwa rendahnya mutu pendidikan di sekolah ada beberapa faktor, yaitu:

“Proses pembelajaran di lembaga pendidikan yang selalu berorientas pada penguasaan teori dan hapalan pada mata pelajaran yang terlihat pada sekolahhyersebut yaitu penekanan pembelajaran tahfiz sehingga menyebabkan kemampuan belajar dan penalaran anak didik kurang berkembang, pelaksanaan pembinaan profesi jabatan guru belum tersistem, Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu terpenting dalam pembangunan pendidikan UU No 2o tahun 2003 telah mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN

atau APBD kedinasan, namun kenyataannya hanya beberapa dari yang menggratiskan pendidikan yang hanya untuk sekolah negeri dan tidak sepenuhnya gratis karena masih ada beberapa pungutan biaya dari sekolah yang biasa pengaturannya diatur oleh sekolah dan komite sekolah.

Tujuan utama pendidikan adalah terwujudnya tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa bagaimana peserta didik menjadi harapan lulusan terbaik jika guru nya kurang kesadaran dan kepedulian dan rasa tanggung jawab. Disini kepala sekolah sebagai pemimpin membuat kebijakan yang tepat. Kepala Sekolah sebagai tulang punggung mutu pendidikan dituntut untuk bertindak sebagai pembangkit semangat, mendorong, merintis dan memantapkan serta sekaligus sebagai administrator. Dengan kata lain kepala sekolah adalah pengambil kebijakan, penentu arah tujuan sekolah, dan menjadi salah satu penggerak pelaksanaan manajemen pendidikan yang berkualitas.

Jadi berkualitas atau tidaknya suatu mutu di sekolah akan tampak pada peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu . pengawasan yang benar dan objektif menjadi kunci berkualitasnya program dan kegiatan sekolah.

Dari beberapa pernyataan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang: “Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar (SD Negeri 001 Karang)”.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji penelitian mengenai kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode.

Adapun alasan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari fakta-fakta berupa tulisan dan kata-kata yang berasal dari sumber- sumber atau informan yang dapat diteliti dan dipercaya.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif (descriptive research). pendekatan deskriptif dalam penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsi dan menginterpretasi kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang Selanjutnya Faisal dalam Salim berpendapat bahwa dalam mempelajari perilaku manusia diperlukan penelitian mendalam sampai ke perilaku intinya (inner behavior) secara holistik dan bertolak dari sudut pandang perilaku manusia.

Sejalan dengan pendapat di atas, penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara narrative.

Jadi dapat penulis maksudkan penelitian kualitatif adalah data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari fakta-fakta berupa tulisan dan kata-kata yang berasal dari sumber-sumber atau informan yang dapat diteliti dan dipercaya dengan hasil wawancara danobservasi fisik lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil dari data tersebut akan diuraikan menurut sistematika pembahasan penerapan fungsi-fungsi kebijakan kepala sekolah dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 001 Karang

Perencanaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk merinci langkah-langkah yang akan diambil demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Banyak tujuan yang harus diwujudkan oleh sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun karena keterbatasan sekolah seperti keterbatasan dalam sumber daya manusia, pendanaan, fasilitas dan sebagainya, maka sekolah sebaiknya memfokuskan diri pada beberapa tujuan yang memiliki pengaruh besar pada kinerja sekolah secara keseluruhan. Tujuan inilah yang disebut tujuan utama atau prioritas. Penetapan tujuan utama ini tentunya tergantung kepada kebijakan sekolah serta masukan berbagai pihak yang berkepentingan seperti guru, komite sekolah, dan masyarakat (Dwiyono et al., 2022). Di sekolah SD Negeri 001 Karang dalam menentukan sebuah kebijakan di sekolah biasanya diawali dengan mengadakan rapat, penelitian menunjukkan bahwa seluruh pihak di sekolah tersebut mengadakan rapat sebelum memasuki proses perencanaan. Dalam kegiatan rapat ini, dibahas mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di sekolah. Kepala sekolah melibatkan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan agar proses perencanaan ini berjalan dengan baik dan melibatkan semua pihak yang terkait. Dalam menyusun rencana program ini, sekolah perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, penting untuk menetapkan tujuan dari perencanaan tersebut. Selain itu, manfaat dari perencanaan perlu jelas dan diidentifikasi dengan baik. Tak kalah pentingnya, sekolah juga harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perencanaan. Hasil wawancara dengan narasumber dan dokumentasi menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan dalam menentukan kebijakan melalui beberapa tahap. Proses ini dimulai dengan rapat kerja bersama yang melibatkan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan terkait, di mana rapat kerja disusun berdasarkan kebutuhan yang ada di sekolah.

Hasil penelitian mengenai perencanaan sarana dan prasarana di SD Negeri 001 Karang menunjukkan bahwa sekolah ini telah melaksanakan perencanaan dengan baik. Proses manajemen dimulai dengan mengadakan rapat penyusunan program kebijakan yang melibatkan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam rapat tersebut, dibahas secara mendalam mengenai kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mendukung peningkatan mutu Pendidikan di sekolah. Penting untuk dicatat bahwa perencanaan kebijakan harus dilakukan dengan cermat dan teliti, memperhatikan berbagai aspek, terutama karakteristik kebutuhan yang relevan bagi SD Negeri 001 Karang. Berikut adalah langkah-langkah dalam perencanaan program kebijakan di sekolah: pertama, perencanaan dilakukan dengan tujuan yang jelas; kedua, perencanaan mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh; dan ketiga, perencanaan mengacu pada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Melihat praktik perencanaan kebijakan kepala sekolah di SD Negeri 001 Karang, dapat diketahui bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan karakteristik tersebut. Dalam uraian di atas, terlihat bahwa perencanaan kebijakan kepala sekolah di SD Negeri 001 Karang sudah dilaksanakan dengan baik. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing peserta didik yang tentu saja bervariasi.

Selain itu, perencanaan ini juga melibatkan masukan dari berbagai pihak dan mengevaluasi kebutuhan siswa, terutama kebutuhan siswa itu sendiri. Setelah mempertimbangkan semua aspek tersebut, tujuan dari kebijakan kepala sekolah yang akan diadakan menjadi fokus utama, dilanjutkan dengan penyusunan skala prioritas. Ini diperjelas oleh teori yang diungkapkan oleh Fayol yang dikutip Robbin menyatakan bahwa rencana

memberikan arah sasaran bagi organisasi dan mencerminkan prosedur terbaik untuk mencapai sasaran tersebut (Ilyas Prasetyo, 2020).

2. Pengorganisasian Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 001 Karang

Pengorganisasian merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya yang berkaitan dengan menggerakkan organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh. Bergeraknya organisasi tergantung kepada pengorganisasian seluruh komponen dalam organisasi untuk bergerak ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (Ananda & Banurea, 2017). Pengorganisasian dalam konteks sekolah melibatkan peran aktif kepala sekolah beserta koordinator tiap-tiap kebijakan. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini. Tahapan pengorganisasian mencakup penunjukan koordinator dari masing-masing kebijakan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dan pendataan kebutuhan peserta didik pada setiap kebijakan. Sekolah Dasar Negeri 001 Karang dijadikan objek penelitian telah mengorganisir setiap kebijakan kepala sekolah yang mereka miliki dengan baik. Dengan ditunjuknya koordinator dari masing-masing kebijakan yang juga merupakan tenaga pendidik dan kependidikan di SD Negeri 001 Karang, setiap koordinator bertugas mendata kebutuhan siswa serta fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan dari setiap kebijakan kepala sekolah dalam peningkatan mutu Pendidikan. Karena pada dasarnya mengorganisasikan adalah suatu proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang, dan sumber daya di kalangan anggota sehingga mereka dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien (Ilyas Prasetyo, 2020).

3. Pelaksanaan Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 001 Karang

Pelaksanaan dapat di katakan sebagai kegiatan inti dari kebijakan kepala sekolah untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Pelaksanaan dilakukan oleh kepala sekolah dengan menggerakkan seluruh guru terutama tim structural dan penanggung jawab yang sebelumnya telah dibagi tugas sehingga pelaksanaan dalam meningkatkan mutu Pendidikan lebih dimaksimalkan pada koordinasi tim structural dan penanggung jawab (Kharismawati, 2024) . Di sekolah SD Negeri 001 Karang guru kelas, kepala tata usaha, dan kepala unit perpustakaan secara umum memastikan bahwa semua kebijakan yang dibuat sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan kaidah yang berlaku dan terbukti di SD Negeri 001 Karang, pelaksanaan kebijakan kepala sekolah sudah baik, output nya dapat terlihat dari jumlah siswa yang setiap waktu meningkat mengikuti Sholat Dzuhur berjamaah dan tingkah laku siswa yang semakin baik sesuai dengan nilai-nilai agama yang berlaku, pelaksanaan kebijakan layanan kesehatan yang rutin dan tepat sasaran yang dilakukan setiap tiga bulan sekali, begitupun terhadap kebijakan peningkatan minat baca yang konsisten dibuktikan dengan kemampuan literasi peserta didik yang meningkat, disamping itu hal positif juga didapatkan melalui kebijakan penambahan ekstrakurikuler olahraga cricket dimana salah satu siswa di SD Negeri 001 Karang berhasil menorehkan prestasi sebagai juara umum pada kejuaraan cricket se-kabupaten Kutai Timur dan peraih medali perak pada kejuaraan cricket U-19 Tingkat Provinsi di Samarinda tahun 2024. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat pelaksanaan kebijakan kepala sekolah adalah inti dari pemanfaatan kebijakan kepala sekolah dengan dampak yang harus ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang efektif dan efisien demi tercapai tujuan pendidikan.

4. Pengawasan Kebijakan Kepala sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di

SD Negeri 001 Karang

Pengawasan kebijakan kepala sekolah oleh pihak sekolah dapat dilakukan dengan evaluasi diri. Yaitu, sekolah dapat melihat sendiri kebijakan-kebijakan yang dimiliki. Untuk proses Pengawasan sekolah SD Negeri 001 Karang sudah berjalan dengan baik. Kepala sekolah berkoordinasi dengan para koordinator kebijakan yang bertugas meninjau atau memantau proses pelaksanaan kebijakan apakah sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana atau sebaliknya. Pada proses pengawasan ini juga koordinator kebijakan dapat melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang bisa menjadi faktor pendukung dan penghambat selama proses penerapan semua kebijakan yang berlaku. Setelah mengetahui faktor pendukung maupun penghambat dalam penerapan kebijakan maka kepala sekolah dan koordinator akan melakukan rapat evaluasi secara internal untuk menemukan solusi dari setiap hambatan yang ditemukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan dilaksanakan sesuai dengan manajemen kebijakan sekolah secara rinci seperti diadakan rapat dengan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan guna mengidentifikasi tujuan, menentukan strategi, mengalokasikan sumber daya, dan mengatur jadwal pelaksanaan serta prosedur perencanaan dan skala prioritas yang dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan siswa,
2. Pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tanggung jawab kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang ditunjuk sebagai koordinator kebijakan yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan-kebijakan serta memastikan pelaksanaannya sesuai rencana dan tepat sasaran.
3. Pelaksanaan kebijakan dari mulai perencanaan sampai pengorganisasian dilakukan sesuai dengan fungsi-fungsi kebijakan kepala sekolah dan pelaksanaan kebijakan dalam peningkatan mutu Pendidikan efektif dilakukan sehingga mutu Pendidikan disekolah ini menjadi lebih baik dan meningkat,
4. Pengawasan dilakukan terkait pelaksanaan kebijakan, dimulai dari memantau proses pelaksanaan kebijakan, memantau kerja sama dalam menerapkan strategi kebijakan kepala sekolah, memantau setiap kebijakan yang berjalan apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran, dan memastikan setiap kebijakan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
5. Faktor pendukung dan penghambat kebijakan kepala sekolah dalam peningkatan mutu Pendidikan di SD Negeri 001 Karang adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Tersedianya tempat ibadah (Masjid) dengan perlengkapan sholat yang lengkap yang berada didekat sekolah sehingga peserta didik bisa menunaikan ibadah sholat Dzuhur berjamaah sepulangnya dari sekolah.
 - 2) Adanya ruang perpustakaan yang sudah dilengkapi buku-buku pelajaran fiksi dan nonfiksi serta buku referensi.
 - 3) Dukungan layanan kesehatan yang optimal dari pusat kesehatan setempat terutama terhadap tumbuh kembang peserta didik di sekolah yang merupakan bagian dari program unggulan dari pusat kesehatan tersebut.
 - 4) Memiliki pembina ekstrakurikuler sekaligus pelatih olahraga cricket daerah yang berlisensi.
 - b. Faktor Penghambat

- 1) Masih adanya peserta didik yang tidak serius atau bercandaan ketika sholat berlangsung dan cuaca yang terkadang tidak mendukung.
- 2) Kurangnya keseriusan peserta didik dalam membaca saat berada di perpustakaan biasanya dilakukan dengan bercanda dan kurangnya tenaga perpustakaan sehingga pengelolaan dan pelayanan perpustakaan lebih maksimal.
- 3) Masih adanya peserta didik yang takut untuk di periksa kesehatannya karena phobia dengan jarum suntik sehingga banyak mengulur waktu untuk membujuk peserta didik agar mau di periksa kesehatannya.
- 4) Kurangnya fasilitas olahraga yang menunjang kegiatan ekstrakurikuler sehingga dalam membina menggunakan fasilitas yang kurang memadai yang jauh dari standar kecaboran.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, berikut ini disampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah di SD Negeri 001 Karangn.

1. Sekolah SD Negeri 001 Karangn sebaiknya membuat skala prioritas untuk setiap kebijakan yang dibuat berdasarkan kebutuhan peserta didik guna meningkatkan mutu Pendidikan di sekolah.
2. Sekolah SD Negeri 001 Karangn perlu melakukan pendekatan kepada peserta didik yang intens untuk menanamkan sikap keseriusan dan loyalitas pada peserta didik dalam setiap melakukan kegiatan yang juga akan berdampak positif pada karakter kepribadian peserta didik.
3. Sekolah SD Negeri 001 Karangn perlu menambah layanan kesehatan yang penting bagi peserta didik selain layanan kesehatan yang sudah diterapkan. Hal ini membuat peserta didik lebih merasakan lagi manfaat dari layanan kesehatan secara lebih massif.
4. Sekolah SD Negeri 001 Karangn perlu menambah tenaga perpustakaan untuk menunjang pengelolaan perpustakaan yang kondusif. Dengan begini dapat menciptakan lingkungan yang nyaman bagi peserta didik selama membaca dan belajar.
5. Sekolah SD Negeri 001 Karangn perlu menambah fasilitas serta sarana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang proses pembinaan khususnya ekstrakurikuler yang berpeluang menjadikan peserta didik dapat meraih prestasi setinggi mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbarjono, A. (2014). Konsep Mutu Dalam Perspektif Konsumen Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'lim*, 13(1), 1–18. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/attalim/article/view/539>
- Amirudin, A., & Abu Bakar, N. (2023). Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah (Review). *Jurnal Pendidikan Dan Media Pembelajaran*, 2(1), 21–29. <https://doi.org/10.59584/jundikma.v2i1.7>
- Ananda, R., & Banurea, K. (2017). Manajemen Sarana dan Prasarana. In *Sustainability* (Switzerland).
- Angelina, J. M. (2021). Upaya Meningkatkan Kinerja Guru. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 09(01), 24–36.
- Bawamenewi, A. (2021). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Guru Dan Siswa Di Sma Negeri 1 Lolofitu Moi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(1), 235–241. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i1.2252>
- County, M., & Kaberia, E. S. (2019). *Journal of African Interdisciplinary Studies (JAIS): Journal of African Interdisciplinary Studies (JAIS)*, 3(8), 63–72.
- Dasmana, A., Kurniasih, N., Barlian, U. C., & Sauri, S. (2021). Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada SMP Al-Amanah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(1), 5–10. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i1.197>
- Dwiyono, Y., Warman, W., Kurniawan, D., Atmaja, A. A. B. S., & Lorensius, L. (2022). Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran.

- Scaffolding: *Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 4(3), 319–334. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2107>
- Fadilla, N., Pribadi, R. A., Putri, A., & Ramadhanti, T. P. (2023). Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Karakter. *JIKMA: Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(3), 54–68. <https://doi.org/10.47709/geci.vxix.xxxx>
- Hafid Fadillah, M., & Sanusi, S. (2020). Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Manajemen Sekolah Model. *Journal of Islamic Education Management* Oktober, 2020(2), 111–124. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/kelola>
- Hanim, Z., & Wazir, A. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Efektivitas Kerja Guru di SMP Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan (JIMPIAN)*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v2i1.455>
- Ilyas Prasetyo. (2020). Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Mts Nurul Ikhlas Kota Bekasi. *Al-Mutsla*, 2(2), 172–185. <https://doi.org/10.46870/jstain.v2i2.41>
- Jamil, M., Sewani, R., & Muhammad, N. (2024). Leadership Practices of Head Teachers: Primary School Teachers' Perspective in Public Schools of Punjab. *Research Journal for Societal Issues*, 6(1), 83–92. <https://doi.org/10.56976/rjsi.v6i1.178>
- Kharismawati, D. E. (2024). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di Sekolah Dasar. *Journal of Education Research*, 5(3), 3888–3901. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1514>
- Kholiq, I. N., & Syamsudin, M. (2022). Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Smk Mansyaul Huda Tegaldlimo Banyuwangi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam*, 3(2), 253–269. <https://doi.org/10.30739/jmpid.v3i2.1152>
- Komariyah, L. (2022). Contribution of Transformational Leadership and Years of Leader Experience on the Effectiveness of Organization Efficacy. *Journal of Social Studies Education Research*, 13(4), 308–335.
- Komariyah, L., Adha, M. A., & Ariyanti, N. S. (2024). Structural effect of principals change leadership on e-learning effectiveness. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 13(2), 663–671. <https://doi.org/10.11591/ijere.v13i2.26257>
- Krisbiyanto, A. (2019). Efektifitas Kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap Mutu Pendidikan MTsN 2 Mojokerto. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 52–69. <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i1.182>
- Manonga, K. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Mulyono, M., Komariyah, L., & Mulawarman, W. G. (2023). Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Era Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3(December), 183–194. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2994>
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, April, 147. https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf
- Ristianah, N., & Ma'sum, T. (2022). Konsep Manajemen Mutu Pendidikan. *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(01), 45–55. <https://doi.org/10.52166/tabyin.v4i01.169>
- Sihaloho, I., Azainil, & Asyil. (2021). PENGARUH KEAKTIFAN DAN MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Universitas Mulawarman*, 1, 33–42.
- Sulastri, Happy, F., & Alfroki Martha. (2020). admin, +12+Sulastri+258-264. *Journal of Education Research*, 1(3), 258–264.
- Zulkarmain, L. (2021). Analisis Mutu (Input Proses Output) Pendidikan di Lembaga Pendidikan MTs Assalam Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. *Manazhim*, 3(1), 17–31. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v3i1.946>